

SKRIPSI

PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG

CV TAHITI COAL DI KOTA SAWAHLUNTO

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)

Pembimbing :

Frenadin Adegustara, S.H., M.S

Romi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

(Nurul Amalia, 1610113045, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, 85 halaman)

Reklamasi merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan. Reklamasi bertujuan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Sumatera Barat, diduga salah satu perusahaan tambang batubara di Kota Sawahlunto yaitu CV Tahiti Coal tidak melaksanakan kegiatan reklamasi tambang. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, reklamasi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan. Dalam melakukan reklamasi tambang juga perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi tambang di perusahaan tambang. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana Kegiatan Reklamasi Tambang Oleh CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto? 2) Bagaimana Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pada Lahan Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto? 3) Bagaimana Tindak Lanjut dari Pengawasan Yang Telah Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pada Lahan Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, antara lain 1) Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan CV Tahiti Coal tidak sejalan dengan rencana reklamasi; 2) Pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan reklamasi tambang karena perusahaan tidak memberikan laporan kegiatan reklamasi tambang; 3) Tidak adanya tindak lanjut pengawasan pada kegiatan reklamasi tambang CV Tahiti Coal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci : *Pengawasan, Reklamasi, Tambang Batubara*